



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

PERJANJIAN KINERJA (PK)

Tahun 2026

Dinas Sosial
Kabupaten Seruyan



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2026**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat Ridho-Nya jualah sehingga Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini dapat kami susun. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya baik tenaga, pemikiran dan dukungan dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK) ini kami mengucapkan terima kasih. Juga kepada seluruh bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang ikut berpartisipasi dalam memberikan bahan, saran dan masukan guna mendukung terselesaikanya Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan ini.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan ini disusun berdasarkan data-data yang ada di setiap bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam anggaran tahun 2026, sehingga didalamnya termuat pernyataan tujuan, sasaran, cara pencapaiannya dan realisasi yang telah dicapai.

Kami menyadari penyusunan Perjanjian Kinerja ini masih banyak kekurangan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. untuk itu kritikan



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

dan saran-saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya, maka untuk itu kami akan terus memperbaikinya dalam rangka pengelolaan tata pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan partisipatif.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Dinas,

HALIDAH, S.Pi
Dinas Sosial Tingkat I (IV/b)
SERUYAN NPT 19731004 200604 2 017



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Organisasi.....	3
1.3 Dasar Hukum	19
1.4 Maksud dan Tujuan	24
1.5 Sistematika Penulisan	24
BAB II. PERJANJIAN KINERJA	25
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2026	25
2.2 Capaian Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2025	37
2.3 Capaian Perjanjian Kinerja Esselon III Tahun 2025	42
2.4 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	44
BAB III. PENUTUP	45

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA (PK)

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Esselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Pratama

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA (PK) INTERNAL

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Esselon III (Jabatan administrator)

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Esselon IV (Jabatan Pengawas)

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Pekerja Sosial (JFT
Peksos)

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFT
Prakom)

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Umum (JFU)

Lampiran 7. Cascading Penjenjangan Kinerja



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, sebagai Perangkat Daerah yang bertugas sebagai penyelenggaran kesejahteraan sosial selalu di tuntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan kinerja dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di di Bidang Sosial dengan tipe A, merupakan unsur pelaksana urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang juga mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Seruyan. Seiring dengan kemajuan dibidang Kesejahteraan Sosial yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Memasuki tahun 2026 Kabupaten Seruyan masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan, transisi pengelolaan data bansos, keterlantaran, inflasi, bencana alam dan bencana sosial, permasalahan anak, penanganan orang dengan gangguan kejiwaan, permasalahan sosial baik yang bersifat primer maupun akibat dampak dari non sosial yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembangunan kesejahteraan sosial. Pertambahan jumlah penduduk dari setiap tahun membawa pola pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pada



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

umumnya telah memberikan kontribusi peran pemerintah dan masyarakat didalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sasaran utama program pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah Sumber Daya Manusia, maka perubahan-perubahan yang terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya, taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah tujuan dan kegiatan-kegiatan Program Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai instansi teknis mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijaksanaan dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang Sosial. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Seruyan berupaya memberdayakan segala sumber daya yang ada, sesuai Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang dituangkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran , Kebijakan Teknis, Program dan Kegiatan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang digunakan instansi pemerintah untuk merencanakan, mengukur, mencatat, dan melaporkan kinerja secara akuntabel. SAKIP mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk memastikan anggaran menghasilkan outcome yang terukur.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Dasar hukum utama penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen akuntabilitas kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial merupakan urusan wajib karena merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah urusan bidang sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- b) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

- d) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- e) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- f) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- g) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- h) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- i) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- j) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- k) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - f. Bidang Penanganan Bencana;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional,
 - h. Kelompok Jabatan Pelaksana, dan
 - i. UPTD.

Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi dijelaskan sebagai berikut :



a) Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang sosial serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - d. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b) Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja sekretariat;
 - b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

- c. pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
- d. pengoordinasian administrasi barang milik daerah Dinas;
- e. pengoordinasian administrasi kepegawaian Dinas;
- f. pengoordinasian administrasi umum Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;
- i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
- j. pengoordinasian administrasi pendapatan daerah kewenangan Dinas;
- k. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

(3) Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengoordinasian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;



- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
- g. melaksanakan administrasi keuangan Dinas;
- h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;
- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

c) Bidang Pemberdayaan Sosial

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang Pemberdayaan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;



- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- f. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- g. pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- h. pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah;
- i. pelaksanaan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;
- k. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

d) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
 - d. pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah;



- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

e) Bidang Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan/ atau lembaga;
 - c. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - d. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
 - f. pelaksanaan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
 - g. pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
 - h. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;

- i. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

f) Bidang Penanganan Bencana

- (1) Bidang Penanganan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang Penanganan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Penanganan Bencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan bencana;
 - e. pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
 - f. pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana;
 - g. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

g) Kelompok Jabatan Fungsional



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Kelompok Jabatan Pelaksana

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

i) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

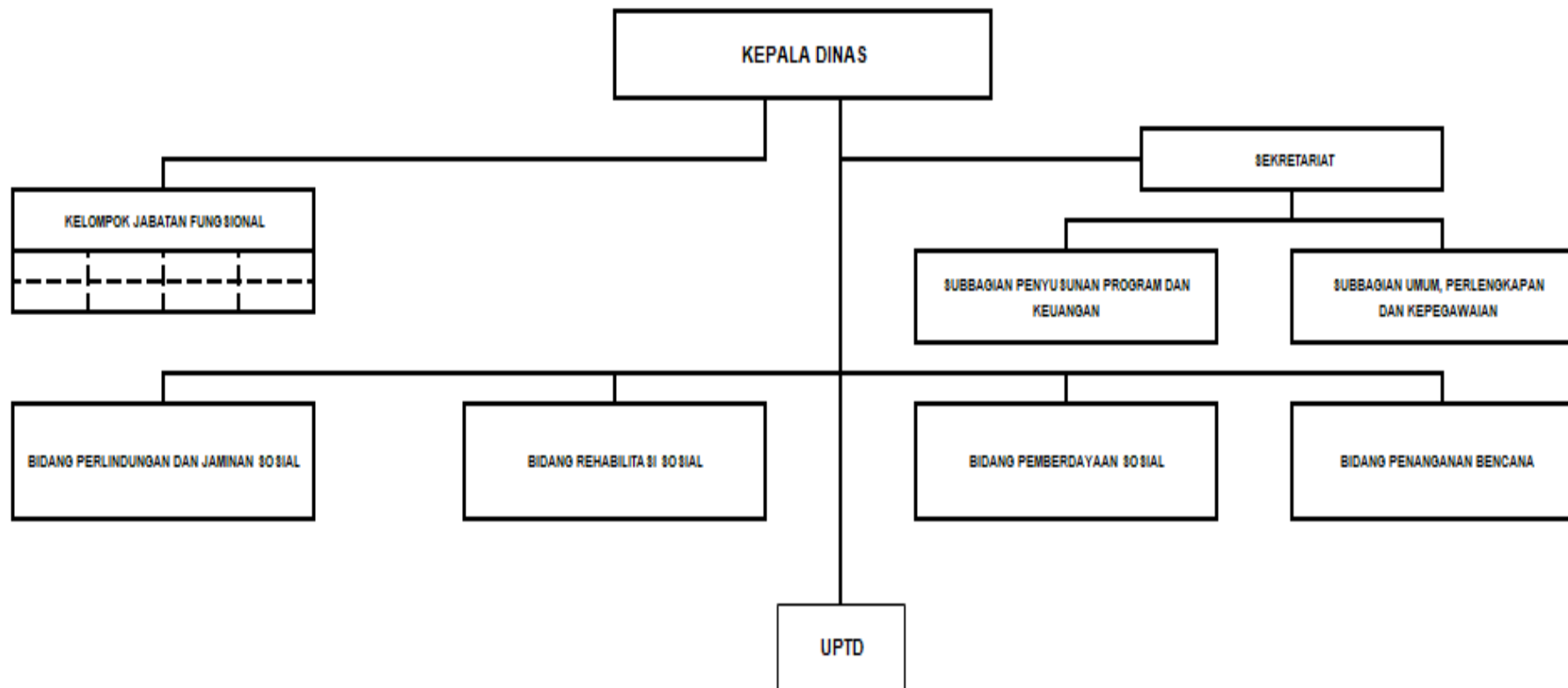
UPTD pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan. UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022, Dinas Sosial memiliki Struktur organisasi seperti pada Gambar berikut ini :

**Tabel 1.1
Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan**





**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

Dibidang sumber daya manusia, jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan per Januari 2026 sebagaimana tersaji pada tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 1.2
Daftar Existing Dinas Sosial Per 1 Januari 2026**

NO	NAMA JABATAN	STATUS ASN			KELAS JABATAN
		PNS	PPPK	PPPK PW	
1	KEPALA DINAS	1	-	-	14
2	PEKERJA SOSIAL MADYA	-	-	-	11
3	PEKERJA SOSIAL MUDA	4	-	-	10
4	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	-	-	-	8
5	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL	-	-	-	6
6	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA	1	-	-	5
7	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	-	-	-	9
8	PERENCANA MADYA	-	-	-	11
9	PERENCANA MUDA	-	-	-	10
10	PERENCANA PERTAMA	-	-	-	8
11	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	-	-	-	7
12	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	-	-	-	6
13	PRANATA KOMPUTER TTERAMPIL	1	-	-	7
14	SEKRETARIS	1	-	-	13
15	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-	-	9
16	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	-	-	7
17	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
18	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	-	5
19	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2	
20	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
21	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN	1	-	-	9
23	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	2	-	7
24	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
25	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	-	5
26	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
27	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
28	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2	
29	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	-	-	11
30	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	-	-	7
31	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	-	-	6
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	-	-	5
33	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
34	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
35	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2	
36	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	-	-	11
37	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	-	7
38	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
39	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	-	5
40	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
41	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
42	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	3	
43	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	-	-	11
44	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	-	7
45	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
46	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	-	5
47	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

48	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
49	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
50	KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA	1		-	11
51	PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	-	-	-	7
52	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	-	6
53	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	-	-	5
54	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	2	
55	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	-	-	1	
56	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	-	-	-	
JUMLAH		22	4	16	

Berdasarkan data dan tabel diatas, tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial Kabupaten Seruyan relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 orang (9,52%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 19 orang (47,62%), D3 sebanyak 2 orang (9,52%), SLTA sebanyak 3 orang (33,33%).

1.3 DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

- Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76)
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

30. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan disusunnya dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar pemberian amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 serta susunan garis besar isi dokumen sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang, Gambaran Organisasi, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini dikemukakan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Capaian Kinerja Tahun 2025, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

BAB III PENUTUP



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

Pada bagian ini mengemukakan kesimpulan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) Tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Sosial untuk kurun waktu periode renstra.

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025-2029 yaitu didasarkan pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 serta mempedomani Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

aspirasi dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang kemudian dirumuskan sebagai berikut :



Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029, antara lain:

- MISI I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.
- MISI II : Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif
- MISI III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik
- MISI IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
- MISI V : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

Dalam konteks penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Seruyan, Dinas Sosial memiliki dukungan langsung pada pencapaian misi ke I Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Untuk pengukuran pencapaian Misi I RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menetapkan indikator kabupaten, sebagai berikut :



Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang didukung Dinas Sosial

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR	TARGET RPJMD					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul	Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan	Menurunnya kemiskinan (Sasaran ke-5)	Tingkat Kemiskinan	6,36%	6,20%	5,50%	5,10%	5,06%	5,01%
				Nilai SAKIP	71	73	74	75	76	77

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goal*) yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi tersebut dan *ultimate outcome* Sektor Pengentasan Kemiskinan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Seruyan, serta permasalahan dan isu-isu strategis pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Seruyan.

Berikut perumusan tujuan (*intermediate outcome*) dan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 dengan relevansi terhadap Sasaran RPJMD :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial

NSPK SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						K E T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	95%	90%	85%	80%	75%	75%	
		Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial	58	60	62	64	66	66	

Dari Rencana Strategis Dinas Sosial untuk mendukung pencapaian sasaran Menurunnya Kemiskinan di Kabupaten Seruyan dengan fokus pada penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan, maka di susunlah penjenjangan kinerja (*cascading*) Dinas Sosial.

Fungsi utama *cascading* (penjenjangan) kinerja adalah menurunkan sasaran strategis pimpinan ke level yang lebih rendah (unit/pegawai) guna



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

memastikan keselarasan, fokus kegiatan, dan akuntabilitas. Proses ini membangun hubungan sebab-akibat (*logika if-then*) dari tujuan strategis ke aktivitas operasional, sehingga memudahkan pengukuran kinerja dan optimalisasi sumber daya. Penjenjangan kinerja dilakukan melalui pohon kinerja (*pokin*) yang menjabarkan hasil ke faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) hingga ke indikator kinerja individu.

Dari cascading (penjenjangan) kinerja Dinas Sosial maka ditetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2026 antara Kepala Dinas Sosial dengan Bupati Kabupaten Seruyan. Untuk selanjutnya Perjanjian Kinerja tersebut diturunkan dalam perjanjian kinerja internal berjenjang dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sampai dengan Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk tahun 2026, sesuai tabel.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK) Esselon II Dinas Sosial Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	IKU YANG MENJADI PK	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	<p>Definisi Operasional : Perhitungan jumlah PPKS yang telah menerima pelayanan sosial, dibagi dengan total PPKS yang teridentifikasi, kemudian dikalikan seratus persen, yang menunjukkan efektivitas intervensi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka</p> <p>Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapat penanganan}}{\text{Jumlah PPKS yang terdata di Kabupaten Seruyan}} \times 100\%$ </p>	ESS. II
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	60	<p>Definisi Operasional : Hasil Penilaian akuntabilitas instansi Pemerintah, yang merupakan integrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas</p> <p>Formulasi Perhitungan: Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP</p>	ESS. II



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

Definisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelayanan sosial yang dilaksanakan mencakup berbagai bentuk bantuan, baik materiil maupun non-materiil, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PPKS.

Perjanjian Kinerja ke-1 Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani, ditetapkan target 100% (seratus persen) pada tahun 2026. Diharapkan kelompok sasaran 12 PAS dapat terdata dan tertangani secara optimal selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan jumlah PPKS bisa menurun secara signifikan sesuai dengan Tujuan Renstra Dinas Sosial.

Perjanjian Kinerja ke-2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial, ditetapkan target meningkat secara bertahap dalam setiap tahun dengan target Nilai 60 di tahun 2026. Di harapkan peningkatan kualitas pelayanan publik pelayanan sosial dan adminitrasi baik dari segi SDM, anggaran dan sarana / prasarana dapat mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

Untuk Tujuan Dinas Sosial Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akan masuk ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun kelima / tahun terakhir (2029).

Penjenjangan sasaran strategis pimpinan ke level yang lebih rendah (unit/pegawai) guna memastikan keselarasan, fokus kegiatan dan memudahkan pengukuran kinerja dan optimalisasi sumber daya. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

Administrator untuk tahun 2026, sesuai tabel.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (PK) Esselon III Dinas Sosial Tahun 2026

NO	SASARAN	IKK YANG MENJADI PK	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB (ESS.III)
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	%	100	Sekretaris
2	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial
3	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial
4	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	%	0	Kabid Pemberdayaan Sosial
5	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
6	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
7	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
8	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
9	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
10	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Rehabilitasi Sosial
11	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
12	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	%	100	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
13	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	70	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
14	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	1,5	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

15	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	Kabid Penanganan Bencana
16	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100	Kabid Penanganan Bencana
17	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	Kabid Penanganan Bencana
18	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100	Kabid Pemberdayaan Sosial
19	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	orang	46	Kabid Rehabilitasi Sosial
20	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	16	Kabid Rehabilitasi Sosial
21	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	12	Kabid Rehabilitasi Sosial
22	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	orang	4	Kabid Rehabilitasi Sosial
23	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota (SPM)	orang	200	Kabid Rehabilitasi Sosial

Penjenjangan kinerja selanjutnya hingga ke indikator kinerja individu menyesuaikan dengan cascading dengan pengaturan perjanjian kinerja internal, sesuai tabel berikut :



**Tabel 2.5
Penjenjangan Kinerja (cascading) Tahun 2026**

TUJUAN	SASARAN	SASARAN (OUTCOME)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	SASARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	TARGET KINERJA	ANGGARAN
Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	90	
	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Program Pemberdayaan Sosial		1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100%	94.405.000
					2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100%	
					3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan	0%	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	100%	94.405.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2	15.570.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6	62.954.000
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitas dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	2	4.315.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	20	11.566.000
		Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Persentase warga Negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100%	3.823.000
			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	100%	3.823.000
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3.823.000
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial		1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	165.878.000
					2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
					3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
					4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	
					5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	161.344.000
			Penyediaan Permakanaan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanaan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	70	22.528.000
			Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10	8.786.000
			Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	42.300.000
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20	29.174.000
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3	13.286.000
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	8	32.023.000
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2	260.000
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	2.739.000
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	1.200.000
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	420.000
			Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	8.628.000
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	3	-
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	4.534.000
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3	4.534.000
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		1. Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	142.888.000
					2. Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	100%	
					3. Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	70%	
					4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1,5%	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	100%	142.888.000
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	39.500	-
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.714	55.196.000
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20	12.800.000



Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	4	74.892.000
		Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Program Penanganan Bencana		1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	150.001.000
					2. Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100%	
					3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100%	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100%	96.473.000
			Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50	29.441.000
			Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30	18.589.500
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10	4.151.000
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	30.565.000
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50	13.726.500
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	100%	53.528.000
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	2	20.512.000
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	69	33.016.000
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan				Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial	60	
		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	100%	5.399.386.067
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100%	48.138.700
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	48.138.700
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%	4.092.797.767
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	4.092.797.767
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	77.655.000
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	77.655.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	320.819.900
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	2.747.300



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	111.142.000
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	7.993.500
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	11.642.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	19.638.100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	167.657.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	688.318.700
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	8.800.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	29.802.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	17.910.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	631.806.700
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	171.656.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	145.856.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	25.800.000
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	100%	28.893.500
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota.	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	100%	28.893.500
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3	28.893.500



2.2 CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pelaporan Kinerja didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah berikut :

Tabel 2.6
Capaian Perjanjian Kinerja / IKU tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	IKU	FORMULASI	SATUAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN
1	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	$\frac{\sum \text{PPKS yang mendapat penanganan}}{\sum \text{PPKS di Kabupaten Seruyan tahun } n} \times 100\%$	%	100	97,04
2		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Angka	58	60,70

Tujuan Dinas Sosial adalah Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan **Sasaran ke-1** Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani. Ditetapkan target mencapai maksimal 100% (seratus persen) untuk tahun 2025.

Capaian realisasi kinerja Dinas Sosial pada tahun 2025 mencapai 97,07% dari target kinerja 100% termasuk dalam kategori **Sangat Baik** (skala 91%-100% menurut Permendagri Nomor 68 Tahun 2021) meskipun mungkin upaya yang dilakukan belum optimal. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 53.664 jiwa dari target PPKS yang terdata 55.302 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja utama telah tercapai sesuai perencanaan.

Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menjadi sasaran utama program dan layanan kesejahteraan sosial dikategorikan dalam 12 kelompok Pemerlu Atensi Sosial (12 PAS). Kelompok-kelompok ini membutuhkan perhatian khusus dalam mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan. **Peningkatan kualitas layanan** yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial



meliputi pemenuhan hidup layak (kebutuhan dasar), dukungan psikososial dengan pendampingan oleh pekerja sosial (Peksos) dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan, bantuan sosial dan bantuan modal usaha untuk kemandirian. Secara umum pelayanan sosial yang telah dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2025 terhadap 12 kelompok rentan berupa :

1. **anak-anak rentan**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi anak terlantar/ anak difabel / anak yatim piatu (YAPI), pendampingan penyelesaian kasus untuk anak bermasalah hukum (ABH)/ anak korban tindak kekerasan/ anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), pelatihan bagi anak putus sekolah dan bantuan sosial untuk anak rentan. Jumlah PPKS yang ditangani 137 orang anak.
2. **difabel**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi penyandang disabilitas, pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas fisik, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi dan reunifikasi untuk penyandang disabilitas mental dan bantuan sosial untuk penyandang disabilitas. Jumlah PPKS yang ditangani 156 orang.
3. **lansia telantar**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi lansia, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi, reunifikasi dan bantuan sosial untuk lansia. Jumlah PPKS yang ditangani 220 orang.
4. **berpendapatan rendah**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi gelandangan / pengemis / pemulung, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi, reunifikasi dan bantuan sosial untuk gepeng. Jumlah PPKS yang ditangani 6 orang.
5. **korban bencana**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) penyediaan makanan dan sandang bagi korban bencana alam/ bencana sosial, Bantuan Sosial bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial / trauma healing, mitigasi bencana melalui pembinaan KSB dan TAGANA. Jumlah PPKS yang ditangani



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

1235 orang.

6. **mereka yang membutuhkan afirmasi khusus**, tidak ada Kelompok Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Seruyan.
7. **warga binaan**, tidak ada data warga binaan Narapidana (Napi) dan Narapidana Teroris (Napiter).
8. **korban kekerasan**, berupa pelayanan sosial fasilitasi penelusuran Keluarga dan Reunifikasi Keluarga (pemulangan ke daerah asal) untuk Pekerja Migran Bermasalah Sosial / Korban Tindak Kekerasan / korban trafficking dan pendampingan khusus penyelesaian kasus. Jumlah PPKS yang ditangani 2 orang / kasus kejadian.
9. **korban NAPZA dan HIV/AIDS**, koordinasi dengan Dinas Sosial dan Puskesmas untuk kerahasiaan data dan bentuk bantuan sosial yang bisa disalurkan (kebutuhan dasar / penguatan ekonomi).
10. **masyarakat yang bermasalah sosial**, berupa pemberian pelayanan konsultasi, konseling, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi (pendampingan khusus penyelesaian kasus) dan pemberdayaan keluarga serta rujukan ke lembaga pelayanan lainnya. Jumlah PPKS yang ditangani 3 keluarga / kasus aduan.
11. **perempuan rentan**, berupa pelayanan pemberian pelatihan ketrampilan, bantuan sosial kewirausahaan untuk kemandirian Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE). Jumlah PPKS yang ditangani 20 orang.
12. **fakir miskin**, berupa perlindungan dan jaminan sosial untuk penduduk yang masuk peringkat kesejahteraan desil 1-5 DTSEN, penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, PBI JKN KIS, Bansos YAPI dan Bansos Lainnya, pemutakhiran data KPM agar bansos tepat sasaran, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk kemandirian keluarga. Jumlah PPKS yang ditangani 51.729 orang.

Sasaran ke-2 Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial. Ditetapkan target capaian Nilai 58 di tahun



2025.

Pada Tahun 2025 capaian kinerja pelayanan urusan administrasi penunjang terealisasi nilai 60,70 predikat “**Baik**” dari target kinerja 58. Dengan predikat SAKIP Baik terdapat gambaran bahwa Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama., namun demikian masih perlu sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Terdapat kenaikan capaian kinerja dibandingkan dari tahun sebelumnya (2024) dari nilai 58 Predikat CC menjadi nilai 60,70 Predikat B pada tahun 2025.

Rekomendasi perbaikan SAKIP dari hasil LHE SAKIP Dinas Sosial telah ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dengan APIP dan BAPPEDA yang menjadi leading sektor perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Serta melakukan tindak lanjut perbaikan administrasi atas rekomendasi Tim Penilaian SAKIP Kabupaten Seruyan.

Secara umum pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025 - 2029, Tujuan Dinas Sosial untuk Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih **belum tercapai**, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan perlu menjadi perhatian dalam penentuan kebijakan sebagai upaya tindak lanjut penyelesaian permasalahan di tahun 2026. Terdapat peningkatan jumlah PPKS dari tahun sebelumnya 2024 sebanyak 41.893 orang berbanding jumlah PPKS tahun 2025 sebanyak 53.664 orang, dengan peningkatan sebesar 28%. Berikut beberapa permasalahan penyebab belum optimal capaian kinerja sesuai target dan rencana tindak lanjut :

Tabel 2.7
Permasalahan dan rencana tindak lanjut

FAKTOR	MASALAH YANG DIHADAPI	SOLUSI / RENCANA TINDAK LANJUT
DATA	Transisi perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan penggabungan dari beberapa data terkait kesejahteraan sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, dan P3KE, mengakibatkan data yang dikelola Dinas Sosial meningkat dan perlu verifikasi dan validasi data kembali.	1. Koordinasi dengan Desa / Kelurahan / Kecamatan untuk pemutakhiran data mandiri 2. Pelatihan operator desa 3. Verifikasi dan validasi langsung (ground check)
	Pengelolaan Data : BNBA penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis belum akurat sehingga memerlukan assesment ulang atau Verifikasi dan Validasi (verivali) ulang. Karena banyak penerima layanan SPM bersifat <i>insidental</i> sehingga menyulitkan perhitungan kebutuhan dan	Integrasi Data : Penggunaan DTSEN yang lebih dinamis untuk menentukan sasaran penerima layanan dasar (seperti disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng) agar lebih akurat.



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

	pada akhirnya antara target dan realisasi terdapat perbedaan. Data belum sepenuhnya terintegrasi dalam DTSEN	
	Masih ada beberapa Kluster 12 PAS yang belum tertangani yaitu kelompok korban NAPZA dan HIV/AIDS dan warga binaan (Napi/Napiter) karena data yang sensitif / rahasia, PPKS yang tidak mau di akses .	1. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan, lembaga pemasyarakatan dan kepolisian 2. Treatment khusus pemberian layanan sosial yang tidak diekspose (terjaga kerahasiaannya)
SUMBER DAYA (SDM DAN SARPRAS)	Minim SDM : Rasio SDM Kesejahteraan Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah PPKS	1. Pengusulan rekrutmen SDM Kessos ke Kemensos dan BKPSDM 2. Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial untuk optimalisasi pelayanan sosial melalui pembinaan dan pelatihan 3. Uji Kompetensi (UKOM) SDM Kesejahteraan Sosial
	Aplikasi : Belum terbentuk Sistem Pemutakhiran Data Mandiri dan aplikasi penyaluran bansos. (Mempelajari sistem update data yang melibatkan relawan dan perangkat desa walaupun Dinas sosial sdh ada operator SIKS NG desa/kelurahan)	Upaya Digitalisasi data, penyaluran dan monitoring bansos, agar bansos tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna
	Aplikasi : Digitalisasi Layanan Pengaduan untuk Pelayanan SPM Sosial	Upaya Digitalisasi Layanan dan Aduan SPM
	Sarana : Belum tersedianya rumah singgah atau shelter sementara bagi ppks sehingga terkadang kesulitan ketika mengevakuasi atau memberikan pelayanan bagi klien ppks disebabkan : minimnya anggaran dalam Pembangunan rumah singgah, keterbatasan SDM professional, belum adanya Perda / Perbup yang mengatur pelayanan rumah singgah	1. Penyusunan perda / perbup Rumah Singgah 2. Pengajuan Nota Dinas untuk pembangunan rumah singgah 3. Pengusulan rekrutment pekerja sosial untuk rumah singgah
	Prasarana :Kondisi Kendaraan Operasional untuk penyaluran Bantuan Korban Bencana yang tidak maksimal Tenda pengungsi dalam kondisi kurang layak	1. Upaya pemeliharaan 2. pengajuan proposal ke kemensos untuk bantuan kendaraan operasional bencana
	Belum terbentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Perlunya Infrastruktur Operasional dan Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan sehingga memiliki SLRT dalam menunjang pelayanan Sosial,Kesehatan dan Pendidikan
	Bentuk adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) pelayanan SPM di tingkat desa / kelurahan / kecamatan, sehingga semua permasalahan sosial langsung ke Dinas Sosial	Koordinasi ke desa/kelurahan / kecamatan untuk pembentukan TRC yang menjadi ujung tombak penanganan permasalahan sosial
	Belum ada Pembentukan Sekolah Rakyat	Upaya Sosialisasi SR, Pendataan Calon Siswa SR, dan proses pembentukan SR Perintis
PENGANGGARAN	Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dinas sosial terbatas	1. Optimalisasi anggaran 2. Pengajuan Proposal kerjasama dan proposal bansos ke BBPPKS, Sentra Rehabilitasi dan Kemensos 3. Pengajuan nota dinas penambahan anggaran APBD
KEBIJAKAN DAN REGULASI	Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Permensos No. 3 tahun 2025 pemutakhiran dan penggunaan DTSEN untuk bansos, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; konsekuensi penggunaan DTSEN yaitu adanya Pemingkatan (Desil), Penerima bansos berubah, kuota penerima bansos daerah berubah dan mitigasi resiko (protes)	1. Koordinasi dengan BPS, Disdukcapil dan lintas sektor lainnya 2. Bersama BPS dan pendamping sosial melakukan ground check
KOLABORASI DAN SINERGI	Belum semua PPKS bisa tertangani karena keterbatasan kuota	1. Kerjasama dengan Panti / Balai / RS / RSJ untuk penanganan PPKS dan penambahan kuota 2. membangun Sinergi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga philantropy (kemanusiaan) untuk meningkatkan pelayanan sosial

Diharapkan untuk beberapa tahun kedepan masa pelaksanaan Renstra 2025-2029, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat menurun secara signifikan, yang menandakan indikator perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin membaik dan dapat mendukung sasaran prioritas Pengentasan Kemiskinan.



2.3 CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau target, baik dalam kuantitatif maupun kualitatif, dan menjadi cerminan prioritas strategis sebuah organisasi, seperti pemerintah, untuk mengevaluasi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penjenjangan sasaran strategis pimpinan ke level yang lebih rendah (unit/pegawai) guna memastikan keselarasan, fokus kegiatan dan memudahkan pengukuran kinerja dan optimalisasi sumber daya. Berikut Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Jabatan Administrator untuk tahun 2025, sesuai tabel :

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinsos 2025

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi per Triwulan IV Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
INDIKATOR KINERJA KUNCI						
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
1	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	DINSOS	Tercapai target
2	Persentase penyelenggara PUB/UGB yang tertib perizinan pengumpulan sumbangan	Persen	100	40	DINSOS	Tidak tercapai target, karena kurangnya kesadaran penyelenggara PUB/UGB tentang pentingnya perizinan pengumpulan sumbangan
3	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persen	100	91	DINSOS	pencapaian belum optimal, SDM Kesos yang bersertifikat UKOM 70 orang dari 77 SDM Kesos
4	Persentase lembaga di bidang sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	Persen	100	167	DINSOS	Melampaui target, realisasi 10 lembaga yang mendapat pembinaan dan peningkatan kompetensi kelembagaan, dari target 6 lembaga
5	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Persen	100	67	DINSOS	Tidak tercapai target karena menyesuaikan dengan kasus yang terjadi, Realisasi hanya ada 2 kasus orang warga negara migran bermasalah sosial yang dipulangkan ke daerah asal
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	DINSOS	Tercapai target, Data disabilitas terlantar yang mendapat layanan SPM target 30 realisasi 50
7	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	94	DINSOS	Tidak tercapai target, Data anak terlantar yang mendapat layanan SPM target 16 realisasi 15 orang
8	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	DINSOS	Tercapai target, Data Lanjut usia terlantar yang mendapat layanan SPM target 10 realisasi 23
9	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	DINSOS	Sesuai target, Data Gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan SPM target 4 realisasi 4
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	DINSOS	Tercapai target, Pemberian bantuan permakanan untuk PPKS lainnya selain yang sudah dilayani SPM



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

11	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	100	99,63	DINSOS	Penerima Bansos PKH, Program Sembako dan PBI sebanyak 62.375 jiwa dari target 62.607 jiwa
12	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persen	70	85,71	DINSOS	6 Kecamatan yang melaksanakan pemutakhiran data (Kec. Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Hanau, Batu Ampar, Seruyan Tengah)
13	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persen	1	4,16	DINSOS	Usulan penidaklayakan dan Ground cek DTSEN dari penerima PKH, BPNT, PBI dan YAPI dari bln Januari - Desember 2025 sebanyak 3.438 orang berbanding data KPM Desil 1-5 sebanyak 82.579 orang
14	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen	100	100	DINSOS	Data Keluarga Penerima Manfaat setelah mendapat bansos UEP, mendapat assesment lanjutan penilaian kemandirian dengan movev
15	Persentase korban bencana alam, sosial dan/non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100	100	DINSOS	Target 200 orang, realisasi 1.235 orang korban bencana alam +156 orang korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 1.391
16	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persen	100	100	DINSOS	Melampaui Target 200 orang, realisasi 245 orang korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat layanan pemulihan sosial (layanan psikososial traumahealing dan bantuan trauma healing untuk anak)
17	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya	Persen	100	100	DINSOS	Sosialisasi kesiapsiagaan bencana sudah dilaksanakan di Kampung Siaga Bencana dan TAGANA
18	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	Persen	100	100	DINSOS	3 Taman Makam Pahlawan (TMP)
19	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Orang	46	50	DINSOS	Data Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapat layanan SPM
20	Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	16	15	DINSOS	Data Anak terlantar yang mendapat layanan SPM
21	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	16	23	DINSOS	Data Lanjut usia terlantar yang mendapat layanan SPM
22	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	4	4	DINSOS	Data Gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan SPM
23	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Orang	200	1391	DINSOS	Data korban bencana yang mendapat layanan SPM

2.4 PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. PPKS membutuhkan pelayanan sosial karena hambatan, kesulitan, atau gangguan yang membuat mereka tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya. PPKS membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

kebutuhan hidupnya secara jasmani, rohani, dan sosial. Pelayanan sosial yang dilaksanakan mencakup berbagai bentuk bantuan, baik materiil maupun non-materiil, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian PPKS.

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdata dan tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025**

NO	12 KELOMPOK PEMERLU ATENSI SOSIAL (12 PAS)	TERDATA	TERTANGANI	BIDANG TEKNIS	
1	ANAK - ANAK RENTAN	1. Balita terlantar	0	0	Rehabilitasi Sosial
		2. Anak terlantar	15	15	Rehabilitasi Sosial
		3. Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	17	17	Rehabilitasi Sosial
		4. Anak difable,	44	44	Rehabilitasi Sosial
		5. Anak korban tindak kekerasan,	13	13	Rehabilitasi Sosial
		6. Anak jalanan,	0	0	Rehabilitasi Sosial
		7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	23	23	Rehabilitasi Sosial
		8. Anak Yatim Piatu (YAPI)	25	25	Rehabilitasi Sosial
2	DIFABEL	9. Penyandang Disabilitas	320	156	Rehabilitasi Sosial
3	LANSIA TERLANTAR	10. Lanjut Usia Terlantar / Miskin	1694	220	Rehabilitasi Sosial
4	BERPENDAPATAN RENDAH	11. Gelandangan / OT	2	2	Rehabilitasi Sosial
		12. Pengemis	1	1	Rehabilitasi Sosial
		13. Pemulung	3	3	Rehabilitasi Sosial
5	KORBAN BENCANA	14. Bencana Alam	1235	1235	Penanganan Bencana
		15. Bencana Sosial	156	156	Penanganan Bencana
6	AFIRMASIS KHUSUS	16. Kelompok Adat Terpencil (KAT)	tdk ada	tdk ada	Pemberdayaan Sosial
7	WARGA BINAAN / Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	17. Narapidana (NAPI)	0	0	Rehabilitasi Sosial
		18. Narapidana Teroris (NAPITER)	0	0	Rehabilitasi Sosial
8	KORBAN KEKERASAN	19. Korban tindak kekerasan	0	0	Rehabilitasi Sosial
		20. Korban trafficking	0	0	Rehabilitasi Sosial
		21. Pekerja migran bermasalah sosial	2	2	Rehabilitasi Sosial
9	KORBAN NAPZA DAN HIV/AIDS	22. Korban penyalahgunaan NAPZA	0	0	Rehabilitasi Sosial
		23. Penderita HIV/AIDS	0	0	Rehabilitasi Sosial
10	BERMASALAH SOSIAL	24. Kelompok minoritas	0	0	Rehabilitasi Sosial
		25. Keluarga bermasalah sosial psikologis	3	3	Resos dan Dayasos
11	PEREMPUAN RENTAN	26. Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE)	20	20	Rehabilitasi Sosial
		27. Tuna Susila	0	0	Rehabilitasi Sosial
12	FAKIR MISKIN	28. Fakir Miskin / rentan (penerima bansos)	51.729	51.729	Perlindungan dan Jaminan Sosial
JUMLAH			55.302	53.664	

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

Seruyan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.9
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025**

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH	SERTIKAT KOMPETENSI / AKREDITASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Pekerja Sosial (Profesional)	5	1	Data Peksos Dinsos Tahun 2025	1 Orang Peksos Murni, 4 orang Peksos Penyetaraan (Sekretariat Dinas Sosial)
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	7	3	Data PSM Kab. Seruyan	Dayasos Dinsos
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	3	SK Kemensos tt TKSK	Dayasos Dinsos
4	Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas)	3	3	Data Pensosmas Dinsos Tahun 2025	Dayasos Dinsos
5	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	5	5	Data SDM Kesejahteraan Sosial 2025	Dayasos Dinsos
6	Pendamping Rehabilitasi Sosial	1	1	Data SDM Kesejahteraan Sosial 2025	Dayasos Dinsos
7	Relawan Sosial	2	2	Data SDM Kesejahteraan Sosial 2025	Dayasos Dinsos
8	Pelopop Perdamaian	3	0	Data SDM Kesejahteraan Sosial 2025	Penanganan Bencana
9	Taruna siaga Bencana (TAGANA)	65	65	SK Tagana	Penanganan Bencana
10	Kampung Siaga Bencana (KSB)	2	0	SK KSB	Penanganan Bencana
11	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	10	4	Daftar Direktori LKS LKSA	Dayasos Dinsos
12	Karang taruna	59	0	Data BNBA Karang Taruna Kab. Seruyan	Dayasos Dinsos
13	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	0	SK Bupati tentang LK3	Dayasos Dinsos
14	Keluarga pioner	5	0	Data keluarga pioneer	Dayasos Dinsos
15	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0	0	n/a	Dayasos Dinsos
16	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	0	0	n/a	Dayasos Dinsos
17	Dunia Usaha	4	0	Data Dunia Usaha Penyelenggara Kessos / CSR	Dayasos Dinsos
JUMLAH PSKS		182	87		



BAB III P E N U T U P

Sebagai upaya untuk perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya koordinasi dan pengembangan jaringan kerja lintas sektoral antara SKPD/instansi terkait, Stake holder dan semua pihak pemangku kepentingan untuk sinkronisasi dalam menjalankan program/kegiatan dan kegiatan dalam upaya pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial.
2. Berorientasi kepada informasi dan data lapangan, terutama validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai dasar dalam perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk menentukan langkah dalam pelayanan bidang sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Agar lebih fokus kepada program dan kegiatan yang capaian kinerjanya masih rendah, meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan sosialisasi kepada masyarakat terus di tingkatkan sehingga lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu didukung dana dan operasional dari Pemerintah Daerah.
5. Melalui laporan ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan perhatiannya terhadap upaya pembinaan, pelayanan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial di Kabupaten Seruyan.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang di jabarkan ke dalam arah kebijakan dan program kegiatan. Untuk memenuhi tujuan dan sasaran maka dilaksanakan strategi pencapaian tujuan dan sasaran sesuai rencana strategis Dinas Sosial 2025-2029, yaitu :



**Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026**

1. Peningkatan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan arah kebijakan Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Verifikasi / Validasi Proses Usulan Data untuk mendukung pemutakhiran DTSEN,
2. Kolaborasi dan integrasi program kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial, dengan arah kebijakan Meningkatkan kualitas Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial
3. Penguatan kompetensi pilar pilar kesejahteraan sosial, dengan arah kebijakan Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Demikian Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Seruyan disusun, kiranya bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026



Kepala Dinas,

BALIDAH S.Pi

Revisi Tingkat I (IV/b)

NPA 19731004 200604 2 017

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HALIDAH, S.Pi

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.

Jabatan : Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua

Bupati Seruyan

AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si

Pihak Pertama

Kepala Dinas Sosial

HALIDAH, S.Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017

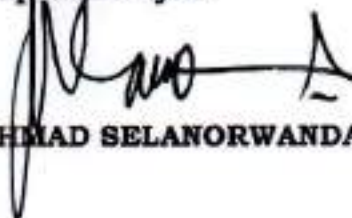
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	60 (B)

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 94.405.000	APBD
2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 3.823.000	APBD
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 166.078.000	APBD
4.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp. 142.888.000	APBD
5.	Program Penanganan Bencana	Rp. 150.001.000	APBD
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 28.893.500	APBD
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.399.386.067	APBD

Pihak Kedua

Bupati Seruyan



AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.

Pihak Pertama

Kepala Dinas Sosial



HALIDAH, S.Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017

**PERJANJIAN
KINERJA (PK)
INTERNAL**

**PERJANJIAN
KINERJA (PK)
INTERNAL
SEKRETARIAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS SOSIAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HALIDAH, S. Pi**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Dinas Sosial

HALIDAH, S. Pi

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19731004 200604 2 017

Pihak Pertama

Sekretaris Dinas Sosial

KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770911 200604 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja / Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	100 %

	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.399.386.067	APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.138.700	APBD
a.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.138.700	APBD
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.092.797.767	APBD
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.092.797.767	APBD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.655.000	APBD
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	77.655.000	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.819.900	APBD
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.747.300	APBD
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.142.000	APBD
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.993.500	APBD
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.642.000	APBD
e.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.638.100	APBD
f.	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	167.657.000	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	688.318.700	APBD
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.800.000	APBD
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.802.000	APBD
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.910.000	APBD
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	631.806.700	APBD
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.656.000	APBD

a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perongan Dinas atau Kendaraan Dinas /Jabatan	145.856.000	APBD
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.800.000	APBD

Pihak Kedua

Kepala Dinas Sosial



HALUJAH, S. Pi

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19731004 200604 2 017

Pihak Pertama

Sekretaris Dinas Sosial

KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19770911 200604 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RIA KHAIRIAH, SH**

Jabatan : **KASUBBAG PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Sekretaris

KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770911 200604 1 004

Pihak Pertama
Kasubbag Penyusun Program dan
Keuangan

RIA KHAIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100 %
2.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
3.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100 %
4.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang



1.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 48.138.700	-
a.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan.	-	-
b.	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-
c.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 48.138.700	-
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.092.797.767	-
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.092.797.767	-

Pihak Kedua
Sekretaris



KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770911 200604 1 004

Pihak Pertama
Kasubbag Penyusunan Program dan
Keuangan



RIA KHAIIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DIAN ANDINI, S.A.P**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RIA KHAIRIAH, SH**

Jabatan : **KASUBBAG PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Penyusun Program Dan
Keuangan


RIA KHAIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan


DIAN ANDINI, S.A.P
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19850825 200604 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data Administrasi Keuangan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Dokumen
2.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data Administrasi Keuangan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN untuk pembayaran belanja barang dan jasa	Jumlah SPJ belanja barang dan jasa yang diajukan	150 Dokumen
3.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data Administrasi Keuangan dengan menggunakan aplikasi	Jumlah aplikasi yang di operasikan	4 Aplikasi
4.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Membuat konsep telaahan staf / Nota Dinas. Mendiskusikan konsep, Mengetik konsep surat rekomendasi, Memberikan saran, Melaporkan hasil pelaksanaan tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
5.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
6.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	50 Laporan
7.	Melaksanakan tugas pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai arahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai arahan	1 Tahun

Handwritten signature

Program /Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

-

-

Pihak Kedua
Kasubbag Penyusun Program Dan Keuangan

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan



RIA KHAIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008



DIAN ANDINI, S.A.P
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19850825 200604 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARPIAH, S.A.P**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RIA KHAIRIAH, SH**

Jabatan : **KASUBBAG PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Penyusun Program Dan
Keuangan

RIA KHAIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

ARPIAH, S.A.P
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19790808 200701 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, menghimpun dan mengklarifikasikan, mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen pengajuan SPM	150 Dokumen
2.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, menghimpun dan mengklarifikasikan, mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen SP2D	150 Dokumen
3.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, menghimpun dan mengklarifikasikan, mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data Administrasi Keuangan	Jumlah Aplikasi yang dioperasikan	1 Aplikasi
4.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, menghimpun dan mengklarifikasikan, mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan
5.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Mengetik konsep surat rekomendasi, Memberikan saran, Melaporkan hasil pelaksanaan tugas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50 Laporan
6.	Terlaksananya tugas pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai arahan	Melaksanakan tugas pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai arahan	12 Kegiatan

R. U.

Program /Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

-

-

Pihak Kedua
Kasubbag Penyusun Program Dan
Keuangan

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan



RIA KHAIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

ARPIAH, S.A.P
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19790808 200701 2 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NORJENAH, S.A.P**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RIA KHAIRIAH, SH**

Jabatan : **KASUBBAG PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Penyusun Program Dan
Keuangan

RIA KHAIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

NORJENAH, S.A.P
Penata Muda (III/a)
NIP. 19790712 201406 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Sosial	10 Dokumen
2.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
4.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan
7.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan
8.	Melaksanakan tugas pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai arahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai arahan	4 Kegiatan



Program /Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

-

-

**Pihak Kedua
Kasubbag Penyusun Program Dan Keuangan**

**Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan**


**RIA KHAIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008**


**NORJENAH, S.A.P
Penata Muda (III/a)
NIP. 19790712 201406 2 002**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NOR TRIYA DEWI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIA KHAIRIAH, SH
Jabatan : KASUBBAG PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Penyusun Program Dan
Keuangan


RIA KHAIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran


NOR TRIYA DEWI
Pengatur Muda (V)
NIP. 19790327 202621 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Sosial	8 Dokumen
2.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan
7.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi, Menghimpun dan mengklasifikasikan, Mempelajari, menganalisa serta menelaah karakteristik dan spesifikasi bahan dan data laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Laporan
8.	Melaksanakan tugas pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai arahan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai arahan	4 Kegiatan

Ri #

Program /Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

-

-

Pihak Kedua
Kasubbag Penyusun Program Dan Keuangan

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



RIA KHAIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

NOR TRIYA DEWI
Pengatur Muda (V)
NIP. 19790327 202621 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANIK SRI SAWITRI, S.A.P

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIA KHAIRIAH, SH

Jabatan : KASUBBAG. PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Penyusun Program dan
Keuangan



RIA KHAIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional



ANIK SRI SAWITRI, S.A.P
NIP. 19840703 202521 2 064

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima dan Memeriksa Bahan Kerja Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Sosial	120 Dokumen
2.	Mempelajari Bahan Kerja Administrasi Keuangan sesuai teknis SOP Subbag Penyusunan Program dan Keuangan	Jumlah dokumen bahan kerja administrasi	120 Dokumen
3.	Menata Kegiatan Pelayanan Operasional Administrasi Keuangan sesuai teknis SOP Subbag Penyusunan Program dan Keuangan	Jumlah dokumen kegiatan pelayanan oprasional administrasi	120 Kegiatan
4.	Melayani Konsultasi Pelayanan Operasional sesuai teknis SOP Subbag Penyusunan Program dan Keuangan	Jumlah dokumen pelayanan operasional	120 Kegiatan
5.	Melaporkan Pelaksanaan Tugas	Jumlah laporan pelaksanaan tugas	6 Laporan

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-

Kasubbag Penyusun Program dan Keuangan



RIA KHAIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional



ANIK SRI SAWITRI, S.A.P
NIP. 19840703 202521 2 064



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYLVIE ANGGRIANI, ST
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RIA KHAIRIAH, SH
Jabatan : KASUBBAG. PENYUSUN PROGRAM DAN KEUANGAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Penyusun Program dan
Keuangan

RIA KHAIRIAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional

SYLVIE ANGGRIANI, ST
NIP. 19980310 202521 2 050

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima dan Memeriksa Bahan Kerja Penyusun Program dan Pelaporan Kinerja	Jumlah dokumen Penyusun Program dan Pelaporan Kinerja	20 Dokumen/Data
2.	Mempelajari Bahan Kerja Penyusun Program dan Pelaporan Kinerja sesuai teknis SOP Subbag Penyusunan Program dan Keuangan	Jumlah dokumen atau data Penyusun Program dan Pelaporan Kinerja	20 Dokumen/Data
3.	Menata Kegiatan Pelayanan Operasional Penyusun Program dan Pelaporan Kinerja sesuai teknis SOP Subbag Penyusunan Program dan Keuangan	Hasil Laporan Kinerja Penyusunan Program	20 Kegiatan
4.	Melayani Konsultasi Pelayanan Operasional sesuai teknis SOP Subbag Penyusunan Program dan Keuangan	Jumlah foto dengan bidang terkait teknis input aplikasi /konsultasi data	20 Kegiatan
5.	Menyusun laporan Pelaksanaan Tugas Penyusun Program dan Pelaporan Kinerja	Jumlah laporan perbulan (bukti laporan tertulis/foto)	12 Laporan

Program /Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

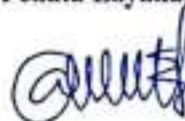
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kasubbag Penyusun Program dan Keuangan



RIA KHAIIRAH, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19771230 200604 2 008

**Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional**



SYLVIE ANGGRIANI, ST
NIP. 19980310 202521 2 050



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Jabatan : KASUBBAG. UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Pihak Kedua
Sekretaris

KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770911 200604 1 004

Pihak Pertama
Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian

TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840216 200903 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100 %
2.	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Orang
3.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
4.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
	Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Lembar
	Tersedianya Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
	Tersedianya Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit

t.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 77.655.000	-
a.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Rp. 77.655.000	-
b.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 320.819.900	-
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Rp. 2.747.300	-
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Rp. 111.142.000	-
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Rp. 7.993.500	-
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Rp. 11.642.000	-
e.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Rp. 19.638.100	-
f.	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.	Rp. 167.657.000	-
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 688.318.700	-
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Rp. 8.800.000	-
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp. 29.802.000	-
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Rp. 17.910.000	-
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Rp. 631.806.700	-
4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 171.656.000	-
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perongan Dinas atau Kendaraan Dinas /Jabatan.	Rp. 145.856.000	-
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Rp. 25.800.000	-

Pihak Kedua
Sekretaris



KHRISTIAN HARIVIRGIANTO, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770911 200604 1 004

Pihak Pertama
Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian



TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840216 200903 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYAHRIAN NOOR, A.Md
Jabatan : PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Jabatan : KASUBBAG. UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02. Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian

TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd., MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840216 200903 2 004

Pihak Pertama
Pranata Komputer Terampil

SYAHRIAN NOOR, A.Md
Pengatur (II/c)
NIP. 19940214 202605 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYAHRIAN NOOR, A.Md
Jabatan : PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Jabatan : KASUBBAG. UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02. Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian

TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd., MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840216 200903 2 004

Pihak Pertama
Pranata Komputer Terampil

SYAHRIAN NOOR, A.Md
Pengatur (II/c)
NIP. 19940214 202605 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : LAILATUL RAHMAWATI, S.A.P

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM

Jabatan : KASUBBAG. UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Lumpur, 02, Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian

TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840216 200903 2 004

Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional

LAILATUL RAHMAWATI, S.A.P
Penata Muda (IX)
NIP. 19910502 202621 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima, mencatat, memeriksa, mengagendakan dan menginventarisasi bahan dan data di Subbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian sesuai	Jumlah Surat yang tercatat dan tersampaikan dengan baik Jumlah data surat tugas dan rekap absen	120 Dokumen 120 Dokumen
2.	Menata file kepegawaian dan tertatanya arsip kepegawaian di Subbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian	Jumlah SK, berkas kenaikan pangkat dan berkas lainnya kepegawaian secara sistematis	120 Dokumen
3.	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran dan umum pada Subbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen yang dicetak atau digandakan	10 Dokumen
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Dokumen
		Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	20 Dokumen
4.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kedinasan yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	3 Laporan

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Kegiatan Administrasi Umum	-	-
Perangkat Daerah	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	-	-
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	-
2. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HASAN, SE**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM**

Jabatan : **KASUBBAG. UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian

TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840216 200903 2 004

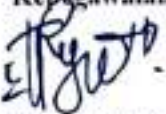
Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional

HASAN, SE
Penata Muda (IX)
NIP. 19830604 202621 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi bahan dan data di Subbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Dokumen
		Jumlah Bahan Penyediaan Logistik	20 Dokumen
		Jumlah Surat Menyurat yang di sediakan	120 Dokumen
		Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Dokumen
2.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	3 Laporan

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Kegiatan Administrasi Umum	-	-
Perangkat Daerah	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-

Pihak Kedua
 Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
 Penata Tingkat I (III/d)
 NIP. 19840216 200903 2 004

Pihak Pertama
 Penata Layanan Operasional

HASAN, SE
 Penata Muda (IX)
 NIP. 19830604 202621 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ALAMSYAH
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Jabatan : KASUBBAG. UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02. Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian

TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840216 200903 2 004

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran

MUHAMMAD ALAMSYAH
Pengatur Muda (V)
NIP. 19800426 202621 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima dan memeriksa serta menginventarisasi bahan dan data di Subbag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Menyurat yang disediakan	5 Dokumen
		Jumlah Jasa Peralatan Surat Menyurat yang disediakan	5 Dokumen
2.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan penugasan kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	3 Surat Tugas

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-

Pihak Kedua
Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian



TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840216 200903 2 004

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



MUHAMMAD ALAMSYAH
Pengatur Muda (V)
NIP. 19800426 202621 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SALASIAH EVA INDRIANI
Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd. MM
Jabatan : KASUBBAG. UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian

TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd. MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840216 200903 2 004

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional

SALASIAH EVA INDRIANI
NIP. 19930827 202521 2 112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyiapkan bahan dan data di Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian	Jumlah Surat yang tercatat dan tersampaikan dengan baik	120 Dokumen
		Jumlah surat tugas dan rekap absensi	120 Dokumen
2.	Melakukan penataan file kepegawaian dan tertatanya arsip kepegawaian di Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian	Jumlah SK, berkala, surat cuti dan berkas kepegawaian lainnya secara sistematis	120 Dokumen
	Melakukan pelayanan kebutuhan pencetakan dokumen terkelolanya penggandaan laporan dan dokumen dinas	Jumlah dokumen yang dicetak atau digandakan	10 Dokumen
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Dokumen
		Jumlah bagian logistic kantor yang disediakan	20 Dokumen
	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kedinasan yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	3 Laporan

Program /Kegiatan

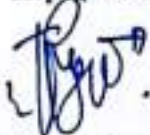
Anggaran

Keterangan (APBD/APBN)

1. **Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-
-

Pihak Kedua
Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian



TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840216 200903 2 004

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional



SALASIAH EVA INDRIANI
NIP. 19930827 202521 2 112



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERNAWATI
Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Jabatan : KASUBBAG. UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02. Januari 2026

Pihak Kedua
Kasubbag Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian

TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840216 200903 2 004

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional

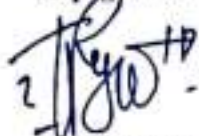
ERNAWATI
NIP. 19720109 202521 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menyediakan layanan administrasi kepegawaian secara tertib dan tepat waktu	Jumlah Surat masuk dan surat keluar yang diarsipkan	120 Dokumen
		Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Dokumen
	Melaksanakan layanan administrasi secara akurat dan tepat waktu	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60 Dokumen
		Jumlah bahan logistic yang disediakan	120 Dokumen
2.	Melaporkan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kedinasan yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	3 laporan

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-

Pihak Kedua
Kasubbag. Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian



TERRY YUSTIAH WANDIRA, S.Pd.MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840216 200903 2 004

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional



ERNAWATI
NIP. 19720109 202521 2 011

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INTERNAL
BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RUBI KUSWANTO, S.Sos.I., M.A.P**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HALIDAH, S. Pi**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua

Halidah, S. Pi
Kejaja
Kepala Dinas Sosial

Halidah, S. Pi

Kejaja
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19731004 200604 2 017

Pihak Pertama

Rubi Kuswanto, S.Sos.I., M.A.P
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

RUBI KUSWANTO, S.Sos.I., M.A.P

Pembina (IV/a)

NIP. 19771231 200903 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100%
2.	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100%
3.	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	100%

	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	94.405.000	APBD
1.	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	94.405.000	APBD
a.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota.	15.570.000	APBD
b.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota.	62.954.000	APBD
c.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	4.315.000	APBD
d.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	11.566.000	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN MAKAM PAHLAWAN	28.893.500	APBD
1.	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	28.893.500	APBD
a.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	28.893.500	APBD

Pihak Kedua
Kepala Dinas Sosial



HALIDAH, S. Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

RUBI KUSWANTO, S.Sos.I., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. ANDI MUSLIM, SH
Jabatan : PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUBI KUSWANTO, S.Sos.I.,M.A.P
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial


RUBI KUSWANTO, S.Sos.I.,M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

Pihak Pertama
Pekerja Sosial Ahli Muda


M. ANDI MUSLIM, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750522 200701 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	50%
2.	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Sertifikat
3.	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	APBD
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	-	APBD
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	APBD
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	-	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

RUBI KUSWANTO, S.Sos.I.,M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

Pihak Pertama
Pekerja Sosial Ahli Muda

M. ANDI MUSLIM, SH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19750522 200701 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD ARI YANTO, S. Sos., M.A.P

Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUBI KUSWANTO, S.Sos.I.,M.A.P

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

RUBI KUSWANTO, S.Sos.I.,M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

Pihak Pertama
Pranata komputer Ahli Muda

MUHAMAD ARI YANTO, S.Sos.,M.A.P
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840202 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	50%
2.	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Keluarga
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga
4.	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota.	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	100%
5.	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 Makam

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	APBD
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	-	APBD
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota.	-	APBD
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota.	-	APBD
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	-	APBD
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

RUBI KUSWANTO, S.Sos.I.,M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

Pihak Pertama
Pranata komputer Ahli Muda



MUHAMAD ARI YANTO, S.Sos.,M.A.P
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840202 200701 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JONI SUSILO,SP
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUBI KUSWANTO, S.Sos.I, M.A.P
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Lumpur, 02 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial



RUBI KUSWANTO, S.Sos.I, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional



JONI SUSILO,SP
NIP. 19930717 202521 1 139

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima dan Memeriksa Bahan Kerja	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Sosial	120 Dokumen
2.	Mempelajari Bahan Kerja Administrasi sesuai teknis SOP Subbag Penyusunan	Jumlah dokumen bahan kerja administrasi	120 Dokumen
3.	Menata Kegiatan Pelayanan Operasional Administrasi sesuai teknis SOP	Jumlah dokumen kegiatan pelayanan oprasional administrasi	120 Kegiatan
4.	Melayani Konsultasi Pelayanan Operasional sesuai teknis SOP Subbag	Jumlah dokumen pelayanan operasional	120 Kegiatan
5.	Melaporkan Pelaksanaan Tugas	Jumlah laporan pelaksanaan tugas	6 Laporan

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	APBD
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	-	APBD
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota.	-	APBD
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota.	-	APBD
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	-	APBD
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota.	-	APBD

**PROGRAM PENGELOLAAN
TAMAN MAKAM PAHLAWAN**
Kegiatan Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/ Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota

-


APBD
APBD

-

APBD

-

~~Kepala Bidang~~ Pemberdayaan Sosial


RUBI KUSWANTO, S.Sos.I., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional


JONI SUSILO, SE
NIP. 19930717 202521 1 139



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MARIANI

Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUBI KUSWANTO, S. Sos.I., M.A.P

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

RUBI KUSWANTO, S. Sos.I., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional

MARIANI
NIP. 19961117 202521 2 098

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengolah dan Menyajikan objek kerja untuk Keluarga Potensi Sosial sesuai Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Keluarga yang mendapat Peningkatan Kemampuan Potensi	5 Keluarga
2	Mengumpulkan dan Mengelompokkan serta menginventarisasi objek kerja Kelembagaan	Jumlah Lembaga yang mendapat Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	10 Lembaga
3	Mengkonsultasikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan proses peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapat peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)	4 Orang
4	Mempelajari dan Mengkaji Karakteristik Spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan Perseorangan yang mendapat peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perseorangan Keluarga Kabupaten/ Kota.	20 Orang
5	Menerima dan Memeriksa kelengkapan bahan dan data Pemeliharaan Makam Pahlawan	Jumlah makam yang mendapat pemeliharaan.	3 Makam
6	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas lisan maupun tulisan sesuai dengan prosedur yang berlaku kepada Pimpinan	Jumlah tugas yang dilaporkan ke Pimpinan.	12 Dokumen

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	APBD
2. PROGRAM PENGELOLAAN MAKAM PAHLAWAN	-	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial



RUBI KUSWANTO, S. Sos.I., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional



MARIANI
NIP. 19961117 202521 2 098



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **LATIPAH, A.Md. Kom**

Jabatan : **PENGELOLAAN LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RUBI KUSWANTO, S. Sos.I., M.A.P**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

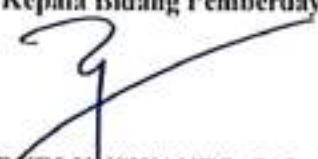
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial


RUBI KUSWANTO, S. Sos.I., M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

Pihak Pertama
Pengelola Layanan Operasional

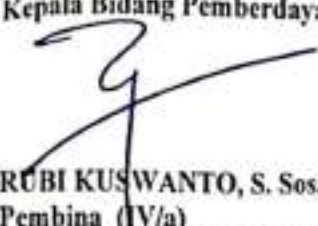

LATIPAH, A.Md. Kom
NIP. 19910601 202521 2 128

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengolah dan Menyajikan objek kerja untuk Keluarga Potensi Sosial sesuai Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Keluarga yang mendapat Peningkatan Kemampuan Potensi	5 Keluarga
2	Mengumpulkan dan Mengelompokkan serta menginventarisasi objek kerja Kelembagaan	Jumlah Lembaga yang mendapat Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	10 Lembaga
3	Mengkonsultasikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan proses peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendapat peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)	4 Orang
4	Mempelajari dan Mengkaji Karakteristik Spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan Perseorangan yang mendapat peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perseorangan Keluarga Kabupaten/ Kota.	20 Orang
5	Menerima dan Memeriksa kelengkapan bahan dan data Pemeliharaan Makam Pahlawan	Jumlah makam yang mendapat pemeliharaan.	3 Makam
6	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas lisan maupun tulisan sesuai dengan prosedur yang berlaku kepada Pimpinan	Jumlah tugas yang dilaporkan ke Pimpinan.	12 Dokumen


Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	APBD
2. PROGRAM PENGELOLAAN MAKAM PAHLAWAN	-	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial



RUBI KUSWANTO, S. Sos.I., M.A.P
Pembina (I/V/a)
NIP. 19771231 200903 1 006

Pihak Pertama
Pengelola Layanan Operasional



LATIPAH, A.Md. Kom
NIP. 19910601 202521 2 128

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INTERNAL
BIDANG
REHABILITASI SOSIAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NOVITA MEI SUKOWATI, SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HALIDAH, S. Pi**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Dinas Sosial



HALIDAH, S. Pi

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19731004 200604 2 017

Pihak Pertama

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

NOVITA MEI SUKOWATI, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19790506 200604 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	100%
2.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
3.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
4.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
5.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
6.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	46 Orang
7.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	16 Orang
8.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	12 Orang
9.	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	4 Orang

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	3.823.000	APBD
Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.823.000	APBD
a. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.823.000	APBD
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	166.078.000	APBD
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar		
1. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	161.544.000	APBD
a. Penyediaan Permakanan	22.528.000	APBD
b. Penyediaan Sandang	8.786.000	APBD
c. Penyediaan Alat Bantu	42.300.000	APBD
d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	29.174.000	APBD

e.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	13.286.000	APBD
f.	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.	32.023.000	APBD
g.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat nikah, dan Kartu Identitas Anak.	200.000	APBD
h.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	260.000	APBD
i.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.	2.739.000	APBD
j.	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.200.000	APBD
k.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	420.000	APBD
l.	Pemberian Layanan Rujukan	8.628.000	APBD
2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4.534.000	APBD
a.	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.	4.534.000	APBD

Pihak Kedua
Kepala Dinas Sosial



HALIDAH, S. Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017

Pihak Pertama
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790506 200604 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JULIANSON, SE**
Jabatan : **PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NOVITA MEI SUKOWATI, SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Lumpur, 02 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19731004 200604 2 017

Pihak Pertama
Pekerja Sosial Ahli Muda,

JULIANSON, SE
Penata TK I(III/d)
NIP. 19750710 200604 1 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	100%
2.	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang
3.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
4.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
5.	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
6.	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
7.	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
8.	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	-	-
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial.	-	-
- Penyediaan Alat Bantu.	-	-
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.	-	-
- Pemberian Layanan data dan pengaduan.	-	-
- Pemberian Layanan Kedaruratan	-	-
- Pemberian Layanan Rujukan	-	-
- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-	-

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790506 200604 2 009

Pihak Pertama
Pekerja Sosial Ahli Muda



JULIANSON, SE
Penata TK I(III/d)
NIP. 19750710 200604 1 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD FAIDHANI, SE.
Jabatan : PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790506 200604 2 009

Pihak Pertama
Pekerja Sosial Ahli Muda

AKHMAD FAIDHANI, SE.
Penata TK. I (III/d)
NIP. 19850222 201001 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang
2.	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
3.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
4.	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
6.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang
7.	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Dokumen

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Penyediaan Permakanan	-	-
Penyediaan Sandang	-	-
Pemberian bimbingan fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	-	-
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlanta serta gelandangan pengemis dan Masyarakat.	-	-
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-
Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Luar Panti Sosial.		
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.	-	-

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



NOVITA MENSUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19731004 200604 2 017

Pihak Pertama
Pekerja Sosial Ahli Muda



AKHMAD FAIDHANI, SE.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19850222 201001 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SUNARTI**
Jabatan : **OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **NOVITA MEI SUKOWATI, SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790506 200604 2 009

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional

SUNARTI
NIP. 19760418 202521 2 024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan bahan kerja dan data layanan rehabilitasi social dasar pada Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah dokumen atau data PPKS anak dan gelandangan pengemis yang terlayani	50 Dokumen/Da ta
		Jumlah dokumen atau surat masuk/keluar Bidang Rehabilitasi Sosial	10 Dokumen/surat
2	Melaksanakan layanan rehabilitasi social dasar pada Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah dokumen atau data PPKS anak dan gelandangan pengemis yang mendapat pendampingan Rehabilitasi Sosial	12 Dokumen/Da ta
3	Melakukan Inventarisasi layanan rehabilitasi social dasar pada Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah kegiatan Inventarisasi surat dokumen atau data PPKS Bidang Rehabilitasi Sosial	10 Kegiatan
4	Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan rehabilitasi social	Jumlah laporan pelaksanaan tugas layanan rehabilitasi social dasar yang terlayani	4 Laporan

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	APBD
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



NOVITA MENSUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790506 200604 2 009

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional



SUNARTI
NIP. 19760418 202521 2 024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURUL ULFAH, S. AP
Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790506 200604 2 009

Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional

NURUL ULFAH, S. AP
NIP. 19870715 202521 2 118

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menerima, memeriksa dan mempelajari bahan kerja berupa dokumen atau data layanan rehabilitasi sosial	Jumlah dokumen atau data PPKS yang terlayani	80 Dokumen/Da ta
		Jumlah dokumen, draft surat Keputusan atau masuk/keluar Bidang Rehabilitasi Sosial	10 Dokumen/sur at
2	Menata kegiatan layanan rehabilitasi social dasar sesuai teknis Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah kegiatan layanan Rehabilitasi Sosial dasar yang terlaksana	4 Kegiatan
3	Melayani konsultasi, asismen dan pendampingan rehabilitasi social sesuai teknis Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah kegiatan konsultasi, asismen dan pendampingan rehabilitasi social yang diberikan kepada PPKS	12 Kegiatan
4	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan tugas layanan rehabilitasi social dasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan tugas layanan rehabilitasi social dasar yang disusun	4 Laporan
5	Melayani konsultasi, asismen dan pendampingan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke desa/kelurahan asal	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke desa/kelurahan asal	4 Orang

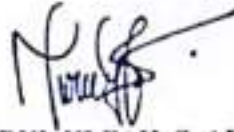
Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	APBD
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



NOVITA MEASUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790506 200604 2 009

Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional



NURUL ULFAH, S. AP
NIP. 19870715 202521 2 118



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARI SYAHRIAL**

Jabatan : **OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NOVITA MEI SUKOWATI, SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790506 200604 2 009

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional

ARI SYAHRIAL
NIP. 19880319 202521 1 078

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan bahan kerja dan data layanan rehabilitasi social dasar pada Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah dokumen atau data PPKS anak dan gelandangan pengemis yang terlayani	20 Dokumen/Da ta
		Jumlah dokumen atau surat masuk/keluar Bidang Rehabilitasi Sosial	10 Dokumen/sur at
2	Melaksanakan layanan rehabilitasi social dasar pada Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah dokumen atau data PPKS anak dan gelandangan pengemis yang mendapat pendampingan Rehabilitasi Sosial	5 Dokumen/Da ta
3	Melakukan Inventarisasi layanan rehabilitasi social dasar pada Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah kegiatan Inventarisasi surat dokumen atau data PPKS Bidang Rehabilitasi Sosial	10 Kegiatan
4	Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan rehabilitasi social	Jumlah laporan pelaksanaan tugas layanan rehabilitasi social dasar yang terlayani	4 Laporan

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	APBD
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



NOVITA MEKSUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790506 200604 2 009

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional



ARI SYAHRIAL
NIP. 19880319 202521 1 078



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG SISWANTO**
Jabatan : **OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **NOVITA MEI SUKOWATI, SH**
Jabatan : **KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 02 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790506 200604 2 009

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional

BAMBANG SISWANTO
NIP. 19870511 202521 1 134

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan bahan kerja dan data layanan rehabilitasi social dasar pada Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah dokumen atau data PPKS lanjut usia yang terlayani.	50 Dokumen/Da ta
		Jumlah dokumen atau surat masuk/keluar Bidang Rehabilitasi Sosial	10 Dokumen/sur at
2	Melaksanakan layanan rehabilitasi social dasar pada Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah dokumen atau data PPKS lanjut usia yang mendapat pendampingan Rehabilitasi Sosial	12 Dokumen/Da ta
3	Melakukan Inventarisasi layanan rehabilitasi social dasar pada Bidang Rehabilitasi Sosial	Jumlah kegiatan Inventarisasi surat dokumen atau data PPKS Bidang Rehabilitasi Sosial	10 Kegiatan
4	Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan rehabilitasi social	Jumlah laporan pelaksanaan tugas layanan rehabilitasi social dasar yang terlayani	4 Laporan

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	APBD
2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial



NOVITA MEI SUKOWATI, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790506 200604 2 009

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional



BAMBANG SISWANTO
NIP. 19870511 202521 1 134

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INTERNAL
BIDANG
PERLINDUNGAN DAN
JAMINANAN SOSIAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROMMEL, S.Pd.,MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HALIDAH, S. Pi**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Dinas Sosial

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial

ROMMEL, S.Pd.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731029 199903 1 003

HALIDAH, S. Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
2.	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	100%
3.	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	70%
4.	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1,5%

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	142.888.000	APBD
1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	142.888.000	APBD
a. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	12.800.000	APBD
b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	55.196.000	APBD
c. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.Pengelolaan	74.892.000	APBD

Pihak Kedua
Kepala Dinas Sosial



ROMMEL, S. Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

ROMMEL, S.Pd.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731029 199903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MILAWATI, S.Ag

Jabatan : PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROMMEL, S.Pd.,MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perlindungan
Dan Jaminan Sosial

ROMMEL, S.Pd.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731029 199903 1 003

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan

MILAWATI, S.Ag
Penata (III/c)
NIP. 19760422 201406 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 %
2.	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	39.500 Orang
3.	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga	Jumlah penerima manfaat (PM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota (KPM PKH dan Sembako)	8.809 Orang
4.	Menerima data terkait data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	Jumlah data terkait data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	4 Dokumen
5.	Menghimpun dan mengklarifikasikan bahan terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	Jumlah bahan terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	8 Dokumen
		Jumlah bahan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	8 Dokumen
6.	Mempelajari, menganalisa serta menelaah dokumen terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	Jumlah dokumen yang dipelajari terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	4 Dokumen
		Jumlah dokumen yang dipelajari terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	4 Dokumen
7.	Mengolah konsep surat/nota dinas terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	Jumlah surat/nota dinas terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	8 Dokumen
		Jumlah surat/nota dinas terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	8 Dokumen
8.	Melaporkan hasil kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).	Jumlah laporan Kegiatan terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	4 Dokumen
		Jumlah laporan Kegiatan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	4 Dokumen

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	142.888.000	APBD
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	55.196.000	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial



ROMMEL, S.Pd.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731029 199903 1 003

Pihak Pertama
Penelaah Teknis Kebijakan



MILAWATI, S.Ag
Penata (III/c)
NIP. 19760422 201406 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SHAIN IKE SEPTIANA, A.Md
Jabatan : PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROMMEL, S.Pd.,MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial,

ROMMEL, S.Pd.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19770911 200604 1 004

Pihak Pertama
Analis Masalah Sosial,

SHAIN IKE SEPTIANA, A.Md
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 19800905 201001 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usulan yang terverifikasi dan tervalidasi dan usulan perbaikan yang dilaksanakan / jumlah pembaharuan data dari desil 1-5 naik ke desil 6-10	1.000 Orang
2.	Menerima dan memeriksa serta memverifikasi dan memvalidasi bahan, data dan informasi calon penerima bantuan sosial	Jumlah bahan / data dan ter Update keluarga penerima manfaat bantuan sosial	10 Laporan dan Dokumen
		Rekap jumlah bahan / data	10 Laporan dan Dokumen
3.	Mempelajari, menganalisa, mengevaluasi dan mengolah laporan hasil kegiatan dari bahan/data hasil kegiatan terkait SDM Penerima Bantuan Sosial	Jumlah bahan/data penerima manfaat bantuan sosial.	10 Laporan dan Dokumen
		Kegiatan pendampingan monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan penyaluran terhadap keluarga penerima manfaat bantuan sosial.	10 Laporan dan Dokumen
4.	Mengkonsultasikan kendala yang timbul dalam pelaksanaan proses objek kerja dengan jabatan yang berwenang.	Konsultasi dan verifikasi dalam permasalahan bantuan sosial	5 Laporan
5.	Melaksanakan kegiatan verifikasi, validasi dan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	Terlaksananya kegiatan verifikasi, validasi dan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	10 Dokumen

Program /Kegiatan

Anggaran

Keterangan (APBD/APBN)

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

74.892.000

55.196.000

APBD

APBD

Kuala Pembuang,

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial,



ROMMEL, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19731029 199903 1003

Pihak Pertama

Pengolah Data dan Informasi



SHAIN IKE SEPTIANA, A.Md

Penata Muda Tingkat I (III/b)

NIP. 19800905 201001 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SYAHIFUR RAHMAT
Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROMMEL, S.Pd.,MM
Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perlindungan
Dan Jaminan Sosial

ROMMEL, S.Pd.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731029 199903 1 003

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran

SYAHIFUR RAHMAT
Penata Muda (III/a)
NIP. 19830219 200701 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapat bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
2.	Menerima data terkait data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	Jumlah data terkait data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	4 Dokumen
3.	Menghimpun dan mengklarifikasikan bahan terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	Jumlah bahan terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Jumlah bahan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	8 Dokumen 8 Dokumen
4.	Mempelajari, menganalisa serta menelaah dokumen terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	Jumlah dokumen yang dipelajari terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Jumlah dokumen yang dipelajari terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	4 Dokumen 4 Dokumen
5.	Mengolah konsep surat/nota dinas terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)	Jumlah surat/nota dinas terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Jumlah surat/nota dinas terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	8 Dokumen 8 Dokumen
6.	Melaporkan hasil kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),	Jumlah laporan Kegiatan terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Jumlah laporan Kegiatan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako	4 Dokumen 4 Dokumen

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	12.800.000	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perlindungan
Dan Jaminan Sosial



ROMMEL, S.Pd.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19731029 199903 1 003

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



SYAHIFUR RAHMAT
Penata Muda (III/a)
NIP. 19830219 200701 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAWAT DAHLIA

Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROMMEL, MM.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial


ROMMEL, MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731029 199903 1 003

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional


MAWAT DAHLIA
NIP. 20010303 202521 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Bahan dan Data	150 Dokumen/Kegiatan
2	Melaksanakan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin dan Sosial Keluarga.	Jumlah Bahan dan Data Yang di Verifikasi	10 Dokumen
		Jumlah Bahan dan Data Pengusulan dan Pembaharuan	150 Dokumen/Kegiatan
3	Melaksanakan Kebijakan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Fakir Miskin dan Sosial Keluarga.	Jumlah Data Hasil Evaluasi	50 Dokumen
4	Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi DTSEN	30 Dokumen/Kegiatan

Program /Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

1. **PROGRAM PENGELOLAAN
DATA FAKIR MISKIN**

APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

ROMMEL, MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731029 199903 1 003

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional

MAWAT DAHLIA
NIP. 20010303 202521 2 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SITI FARIDAH

Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ROMMEL, MM.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial

ROMMEL, MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731029 199903 1 003

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional

SITI FARIDAH
NIP. 19780607 202521 2 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Fakir Miskin	40 Dokumen
		Jumlah Data Pelayanan Penerima Bantuan Sosial	100 Orang

Program /Kegiatan

Anggaran

Keterangan
(APBD/APBN)

1. PROGRAM PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN

APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

ROMMEL, MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731029 199903 1 003

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional

SITI FARIDAH
NIP. 19780607 202521 2 029

**PERJANJIAN KINERJA (PK)
INTERNAL
BIDANG
PENANGANAN BENCANA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SYADILI, SP., MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HALIDAH, S. Pi**

Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Pertama

Kepala Bidang Penanganan Bencana

Pihak Kedua

Kepala Dinas Sosial

SYADILI, SP.,MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19680615 199303 1 010

HALIDAH, S. Pi

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19731004 200604 2 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	97%
2.	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100%
3.	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100%
4.	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota (SPM	200 Orang

	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/PBN)
1..	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	150.001.000	APBD
	Kegiatan Perlindungan Sosial		APBD
1.	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	96.473.000	
a.	Penyediaan Makanan.	29.441.000	APBD
b.	Penyediaan Sandang.	18.589.500	APBD
c.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	30.565.000	
d.	Pelayanan Dukungan Psikososial	13.726.500	APBD
e.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	4.151.000	APBD
	Kegiatan Penyelenggaraan		
2.	Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	53.528.000	APBD
a.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	20.512.000	APBD
b.	Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	33.016.000	APBD

Pihak Kedua

Kepala Dinas Sosial



HALODAN S. Pi

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19731004 200604 2 017

Pihak Pertama

Kepala Bidang Penanganan Bencana

SYADILI, SP.,MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19680615 199303 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AMINAH, S.Kom**

Jabatan : **PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYADILI, SP., MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penanganan Bencana

SYADILI, SP., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680615 199303 1 010

Pihak Pertama
Pekerja Sosial Ahli Muda

AMINAH, S.Kom
Penata (III/c)
NIP. 19790916 200604 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100%
2.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
3.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
4.	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Tempat
5.	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
6.	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	100%
8.	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	2 Kampung
9.	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	69 Orang

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/PBN)
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	APBD
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	-	APBD
Penyediaan Makanan.	-	APBD
Penyediaan Sandang.	-	APBD
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	-	APBD
Pelayanan Dukungan Psikososial	-	APBD
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	APBD
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	-	APBD
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-	APBD
Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	-	APBD

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penanganan Bencana



SYADILI, SP., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680615 199303 1 010

Pihak Pertama
Pekerja Sosial Ahli Muda



AMINAH, S. Kom
Penata (III/c)
NIP. 19790916 200604 2 018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FITRAH ABDUL MALIK**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYADILI, SP., MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penanganan Bencana


SYADILI, SP., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680615 199303 1 010

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran


FITRAH ABDUL MALIK
Penata Muda (III/a)
NIP. 19800719 200604 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima dan mencatat serta memeriksa Data dan Dokumen Korban Bencana Sosial sesuai peraturan perundang-undangan	Data dan Dokumen Bencana Sosial yang diterima dan diperiksa untuk Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Penyediaan Pakaian dan Makanan Setelah Terjadinya Bencana Sosial (Kebakaran)	6 Dokumen
2.	Memberi lembar pengantar serta mempelajari Berkas Dokumen usulan bantuan Korban Bencana Sosial sesuai peraturan perundang-undangan	Berkas Usulan Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial yang dipelajari untuk Penangan Khusus bagi Masyarakat atau Kelompok Rentan yang memenuhi syarat mendapatkan Bantuan Sosial dan Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Sosial (Korban Kebakaran)	4 Dokumen
3.	Menghitung dan menyortir serta merekap data dan Berkas Dokumen Korban Bencana Sosial pasca bencana social sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen yang dihitung dan direkap dari hasil Pelaksanaan Penanganan di Lapangan bagi Masyarakat atau Kelompok Rentan yang berhak Mendapatkan Bantuan Sosial dan Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Sosial (Korban Kebakaran)	4 Dokumen
4.	Mengelompokkan bahan, berkas, data dan dokumen berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan Pelayanan Sosial menurut jenis dan sifatnya sesuai peraturan perundang-undangan	Data dan dokumen yang dikelompokkan dari hasil pelaksanaan Kegiatan di Lapangan dalam Penanganan dan Pelayanan Sosial Korban Bencana Sosial yang sudah Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya baik Bantuan Pakaian maupun Makanan Setelah terjadinya Bencana Sosial (Kebakaran)	2 Dokumen
5.	Mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen yang dihasilkan dari pelaksanaan Kegiatan di Lapangan dalam Penanganan dan Pelayanan Sosial Korban Bencana Sosial yang sudah Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya baik Bantuan Pakaian maupun Makanan Setelah terjadinya Bencana Sosial (Kebakaran)	8 Dokumen
6.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan dan evaluasi dan pertanggung jawaban	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas penanganan korban bencana social baik berupa kelengkapan data maupun dokumen pemeriksaan serta bantuan social dan pelayanan social untuk korban bencana social (korban kebakaran)	2 Laporan

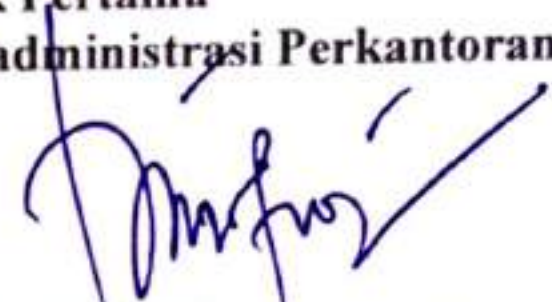
Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. PROGRAM PENANGANAN BENCANA Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota Penyediaan Makanan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Pelayanan Dukungan Psikososial	- - - - - -	- - - - -

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penanganan Bencana



SYADILI, SP., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680615 199303 1 010

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran



FITRAH ABDUL MALIK
Penata Muda (III/a)
NIP. 19800719 200604 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ZULKIFLI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYADILI, SP., MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Lumpur, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penanganan Bencana

SYADILI, SP., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680615 199303 1 010

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran

ZULKIFLI
Penata Muda (III/a)
NIP. 19830304 200604 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengumpulkan Bahan-bahan Kerja berupa Data dan Dokumen Korban Bencana Alam	Data dan Dokumen Bencana Alam yang diusulkan untuk sebagai bahan Dasar Pengajuan Bantuan Bahan Kebutuhan Rumah Tangga (Logistik)	12 Dokumen
2.	Mempelajari dan Menganalisa Bahan dan Berkas Usulan Bantuan Korban Bencana Alam	Berkas Usulan Bantuan Sosial Korban Bencana Alam, masyarakat (KSB dan Taruna Siaga Bencana) yang siap siaga terhadap bencana Alam	5 Dokumen
3.	Mengadakan Penelitian berdasarkan analisa Pelayanan Sosial Bencana Alam	Data dan Dokumen Pelayanan Korban Bencana Alam yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	7 Dokumen
4.	Membuat Laporan berdasarkan Hasil Kerja untuk disampaikan kepada Pimpinan tentang penanganan Bencana Alam	Hasil Pelaksanaan Kegiatan selama dilapangan dalam Penanganan dan Pelayanan Sosial Korban Bencana Alam yang sudah tersalurkan sebagai kebutuhan Dasar Rumah Tangga.	12 Dokumen


Program /Kegiatan

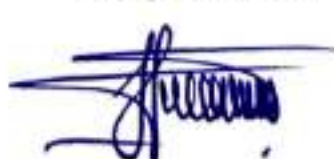
Anggaran

Keterangan (APBD/APBN)

1. **PROGRAM PENANGANAN BENCANA**
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota
 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Pihak Kedua
Kepala Bidang Penanganan Bencana

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran


SYADILI, SP., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680615 199303 1 010


ZULKIFLI
Penata Muda (III/a)
NIP. 19830304 200604 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIANTI, S.A.P

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SYADILI, SP., MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Lumpur, 2 Januari 2026

**Pihak Kedua
Kepala Bidang Penanganan Bencana**


**SYADILI, SP., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680615 199303 1 010**

**Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional**


**YULIANTI, S.A.P
NIP. 19920301 202521 2 074**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data dan dokumen korban bencana alam yang valid sebagai dasar penyaluran bantuan	Jumlah data dan dokumen bencana alam yang diterima untuk bahan dasar pemberian bantuan logistik.	4 Dokumen
2.	Tersusunnya dokumen usulan korban bencana alam sesuai peraturan perundang - undangan	Jumlah dokumen usulan bantuan sosial korban bencana alam	4 Dokumen
3.	Terlaksananya pelayanan penanganan dasar bagi korban bencana alam	Jumlah data dan dokumen pelayanan dasar korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa bantuan logistik, sandang dan pangan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	4 Dokumen
4.	Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas kepada pimpinan sesuai prosedur yang berlaku tentang penanganan korban bencana alam sebagai bahan evakuasi dan pertanggungjawaban.	Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas dalam penanganan dan pelayanan social serta penyaluran bantuan korban bencana alam, baik berupa kelengkapan dan maupun dokumen pemeriksaan	2 Laporan

Program /Kegiatan

Anggaran

**Keterangan
(APBD/APBN)**

1. **PROGRAM PENANGANAN BENCANA**
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota**
- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
- Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

-

-

-

-

-

-

-

Kepala Bidang Penanganan Bencana



SYADILI, SP., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19680615 199303 1 010

**Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional**



YULIANTI, S.A.P

NIP. 19900915 202521 2 076



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NOR FATIMAH, SP**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYADILI, SP., MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGAN BENCANA**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Lumpur, 2 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penanganan Bencana


SYADILI, SP., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680615 199303 1 010

Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional



NOR FATIMAH, SP
NIP. 19900915 202521 2 076

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima dan Memeriksa Bahan Kerja berupa data dan dokumen korban bencana alam.	Jumlah data dan dokumen korban bencana alam yang diterima untuk bahan dasar pemberian bantuan logistik.	4 Dokumen
2.	Mempelajari dokumen usulan bantuan korban bencana alam	Jumlah dokumen usulan bantuan sosial korban bencana alam	4 Dokumen
3.	Menata Kegiatan berdasarkan analisa pelayanan sosial korban bencana alam	Jumlah data dan dokumen korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.	4 Kegiatan
4.	Melaporkan Pelaksanaan Tugas hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan tentang penanganan korban bencana alam	Hasil pelaksanaan kegiatan selama dilapangan dalam penanganan dan pelayanan social korban bencana alam yang sudah tersalurkan	4 Kegiatan

Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1. PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	-	-
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-	-
Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	-	-

Kepala Bidang Penanganan Bencana


SYADILI, SP., MM
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680615 199303 1 010

**Pihak Pertama
 Penata Layanan Operasional**


NOR FATIMAH, SP
 NIP. 19900915 202521 2 076



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RENTO, A.Md.Pi**

Jabatan : **PENGELOLAAN LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYADILI, SP., MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENANGAN BENCANA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, 2 Januari 2026

**Pihak Kedua
Kepala Bidang Penanganan Bencana**

**Pihak Pertama
Pengelola Layanan Operasional**


SYADILI, SP., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680615 199303 1 010


RENTO, A.Md.Pi
NIP. 19830608 202521 1 095

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

No.	Sasaran Kinerja/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menerima dan Memeriksa Bahan Kerja Penanganan Bencana Sosial	Jumlah dokumen Bahan Kerja Penanganan Bencana Sosial	4 Dokumen
2.	Mempelajari Bahan Kerja sesuai teknis Bidang terkait Bencana Sosial	Jumlah dokumen usulan kebutuhan dasar Bantuan Korban Bencana Sosial	3 Dokumen
3.	Mengelola Kegiatan Pelayanan Operasional sesuai teknis Bidang terkait Bencana Sosia	Jumlah data dan dokumen pelayanan Bencana Sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	4 Dokumen
4.	Melayani Pendampingan Pelayanan Operasional sesuai teknis Bidang terkait Bencana Sosial	Pendampingan penyaluran penerima kebutuhan dasar Korban Bencana Sosial	4 Dokumen
5.	Melaporkan Pelaksanaan Tugas terkait tentang Bencana Sosial	Jumlah laporan pelaksanaan tugas	2 Laporan

	Program /Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/APBN)
1.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	-	-
	Penyediaan Makanan.	-	-
	Penyediaan Sandang.	-	-
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	-	-
	Pelayanan Dukungan Psikososial	-	-
	Tempat Penampungan Pengungsi	-	-

Kepala Bidang Penanganan Bencana



SYADILI, SP., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19680615 199303 1 010

Pihak Pertama
Pengelola Layanan Operasional



RENTO, A.Md.Pi
NIP. 19830608 202521 1 095

**CASCADING
PENJENJANGAN
KINERJA**

**DOKUMENTASI
PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KINERJA (PK)**













